

BAB V

KESIMPULAN

Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai presiden G20 (Group of Twenty), sebuah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa, merupakan pengakuan dan penghargaan bagi Indonesia oleh negara-negara besar di dunia. Selain itu, masalah strategis ketiga sangat penting karena berkaitan dengan berbagai kebijakan makroekonomi dan makrofinansial yang digunakan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan ekonomi sehingga pemulihan ekonomi global dapat dimulai lebih cepat. Yang setara antara pengusaha online dan luring, termasuk dalam hal pajak; (ii) perlakuan yang setara terhadap pengusaha luar negeri dalam hal pajak; (iii) perlindungan bagi industri dalam negeri; dan (iv) pengembangan bisnis bagi pengusaha dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh populasi yang besar yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang beragam dan tersebar di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang berbeda-beda. Akibatnya, kesempatan presidensi yang hanya terjadi sekali setiap generasi sekitar dua puluh tahun sekali harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pemulihan ekonomi Indonesia dan menumbuhkan kepercayaan di dalam dan di luar negeri.

Proses digitalisasi dalam transformasi digital telah mempromosikan konsep sharing economy, internet of things (IoT), dan teknologi keuangan yang berdampak pada perubahan lanskap masa depan pekerjaan, pengalaman pelanggan, dan

jaringan pasokan digital dalam ekonomi dunia hingga saat ini. Krisis covid-19 telah memaksa UMKM untuk secara intens dan ekstensif melakukan proses transformasi digital dengan mengadopsi penggunaan teknologi digital dalam struktur dan proses bisnis mereka, yang mencakup proses desain, manufaktur, presentasi, penjualan, pemasaran, bertransaksi, hingga pengelolaan big data. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan digitalisasi ekonomi adalah disparitas digital yang mana salah satu faktor penyebabnya dengan adanya ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang menyebabkan internet tidak dapat diakses oleh beberapa wilayah di Indonesia.

Namun, pendapat tentang presidensi G20 Indonesia berpendapat bahwa prioritas negara akan ditandai oleh kebijakan dan stabilitas ekonomi neoliberal yang solid, yang kemungkinan akan menyebabkan kemunduran yang lebih demokratis di dalam negeri. Kesuksesan Presidensi G20 Indonesia adalah hasil dari kerja sama yang kuat antara pemangku kepentingan di Indonesia dan negara-negara anggota dalam mencapai tujuan yang sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi global. Dinamika kepentingan, proses dan outcome / outcome yang diharapkan akan dinilai untuk mereka yang diklasifikasikan sebagai track 1 (aktor negara) dan non-track 1 (aktor non-negara). Kesuksesan transformasi digital di sektor swasta akan sangat dipengaruhi oleh transformasi digital yang berlangsung di pemerintahan, yang akan berdampak pada perbaikan dan perluasan ekosistem ekonomi digital. Disparitas Digital Sebagai Salah Satu Tantangan Digitalisasi Ekonomi di Indonesia

Dengan target Indonesia dalam memajukan ekonominya di masa yang akan datang, tentunya ada tantangan-tantangan yang dihadapi khususnya dalam

memulihkan ekonomi nasionalnya melalui digitalisasi ekonomi. Diharapkan bahwa kerangka kerja konseptual yang dikembangkan dalam laporan tersebut akan meningkatkan kualitas analisis kebijakan yang mencakup penilaian stabilitas keuangan dan risiko makroprudensial, serta meningkatkan cakupan, frekuensi, dan ketepatan waktu data. Forum G20 juga berupaya memperkuat kerja sama internasional untuk mengamankan keterjangkauan dan aksesibilitas energi dengan membatasi kenaikan harga energi dan meningkatkan teknologi yang bersih, aman, inklusif, dan berkelanjutan. Ini dilakukan dengan mengganti proses bisnis dan layanan non-digital (manual) dengan yang digital (otomatis) atau bahkan lebih jauh mengganti teknologi digital usang dengan yang ditingkatkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Digital Indonesia Roadmap 2021-2024 yang terdiri dari empat pilar: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

G20 juga memahami pentingnya kerja sama internasional yang inklusif dalam perdagangan digital, serta perlunya dukungan bagi peningkatan nilai tambah melalui investasi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor-sektor produktif, seperti sektor manufaktur hilir, perdagangan digital, serta jasa. Indikator proses dan hasil, baik di jalur 1 maupun non-jalur 1 akan diteliti untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi ekonominya untuk mencapai kepentingannya.

Indonesia tentu termasuk sebagai negara yang menginginkan keamanan dalam menjalin hubungan luar negeri dalam sistem internasional. Presiden Jokowi (2014-2019) menetapkan lima arah politik luar negeri Indonesia, antara lain: 1)

penanganan perbatasan; 2) pemantapan peran Indonesia di ASEAN; 3) penguatan diplomasi ekonomi; 4) peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan warga negara/bahan hukum Indonesia (WNI/BHI) di luar negeri khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia; dan 5) pemantapan peran Indonesia dalam kerja sama global (Kementerian Luar Negeri, 2015). Dari kelima poin tersebut, diplomasi ekonomi muncul sebagai istilah baru yang diberitakan di media sehingga akrab di telinga masyarakat. Diplomasi ekonomi Indonesia dipahami sebagai upaya mengedepankan kepentingan ekonomi dalam menjalankan politik luar negerinya. Kementerian Luar Negeri secara spesifik membentuk satuan tugas pelaksana diplomasi ekonomi, yang bertugas untuk: 1) menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia; 2) membuka pasar yang lebih besar di luar negeri bagi komoditas produk Indonesia; dan 3) menumbuhkan jumlah turis asing datang ke Indonesia.

Salah satu fokus diplomasi ekonomi Indonesia adalah penguatan diplomasi demi perluasan pasar prospektif, promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi Indonesia. Sebagai negara emerging economies, Indonesia membutuhkan investasi untuk menggerakkan pembangunan ekonomi nasional. Langkah strategis yang diambil Indonesia adalah menentukan sektor prioritas investasi, menyelaraskan pembangunan nasional dengan sektor prioritas tersebut, memperbaiki iklim investasi, termasuk mengurangi biaya politik yang tinggi di Indonesia. Selanjutnya, upaya di tingkat nasional tersebut dipromosikan melalui fora internasional, termasuk di G20. Salah satu contoh capaian Indonesia adalah pada tahun 2014, yang setelah tiga tahun, usulan Indonesia berhasil diterima menjadi agenda G20

terkait aliran dana investasi infrastruktur yang berasal dari negara maju kepada negara berkembang. Saat itu, Indonesia bersama dengan Jerman dan Meksiko ditetapkan menjadi Kepala Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) G20.

Ditinjau dari pertumbuhan PDB negara G20, Indonesia merupakan salah satu negara yang teratas yang stabil dan cenderung mengalami peningkatan 5% tiap tahunnya. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi senjata bagi Indonesia dalam forum G20 guna mengundang minat investasi infrastruktur di dalam negeri. Kemampuan Indonesia dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya diatas 5% juga dapat menjadikan hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia layak dan mampu untuk mengadvokasikan kebijakan yang berkualitas dan mengarah pada pertumbuhan inklusif untuk kemudian diadopsi oleh negara G20.

Dalam RPJMN 2015-2019, lebih jauh dinyatakan bahwa dalam G20, Indonesia perlu untuk melaksanakan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota demi menjaga sistem perekonomian global yang berkelanjutan. Upaya koordinasi yang dilakukan Indonesia dalam G20 merupakan salah satu cerminan diplomasi komersial Indonesia, yang mana Indonesia secara konsisten memperbaiki persepsi atau pandangan negara anggota G20 mengenai Indonesia. Upaya Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencitrakan kepentingan bisnis yang ingin dicapai. Kekuatan ekonomi Indonesia, diiringi dengan pemetaan industri dan kesempatan investasi yang baik yang dipromosikan Indonesia dalam G20 menjadi strategi untuk membangun fondasi efektif bagi para

pelaku bisnis nasional. Dengan demikian, kepercayaan investor terus terbangun terhadap Indonesia.

Lebih jauh, kepentingan komersial dalam keanggotaan Indonesia di G20 juga didukung oleh outreach group yang disebut “The Business 20” (B20). B20 adalah komunitas bisnis yang merefleksikan peran sektor swasta dalam menumbuhkan ekonomi nasional maupun global. Pertemuan B20 Summit selalu menjadi bagian penting dari KTT G20. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha dari 20 negara anggota G20 berkumpul untuk bersinergi dalam membuka jalan membangun ekonomi global. Dalam rekomendasi B20, negara diharapkan mampu memfasilitasi pasar, meningkatkan peran bank pembangunan multilateral dalam pembangunan infrastruktur, serta mempromosikan inklusi keuangan melalui teknologi digital. Dengan demikian, kepentingan finansial juga menjadi sorotan penting bagi para pelaku usaha yang notabene adalah penggerak roda ekonomi nasional.

Posisi strategis Indonesia di G20 menentukan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia di bidang ekonomi dalam diplomasi ekonomi. Dalam Nawa Cita dan RPJMN dijelaskan Indonesia memiliki 5 orientasi kebijakan luar negeri yakni: a) keamanan dan perdamaian, b) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, c) diplomasi ekonomi, d) kerja sama ASEAN, dan e) diplomasi maritim. Dalam implementasi diplomasi ekonomi Indonesia sebagai pilar politik luar negerinya tentunya memiliki strategi-strategi komprehensif untuk mencapai kepentingan tersebut. Ada empat strategi yang diterapkan yakni konfrontasi, kerkondansi, leadership dan akomodasi. Indonesia memiliki dua komponen yakni

korkondansi dan akomodasi. Diplomasi Indonesia dilakukan dengan kreatif, aktif, antisipatif, transparan luwes sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia sesuai UU/37/1999.

Praktik operasional konsep diplomasi ekonomi di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi jelas menekankan diplomasi ekonomi dengan lebih sentral dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pola ini menjadikan karakter diplomasi Indonesia yang selalu mendesain pola program dalam kepentingan bersama. Alasannya, dengan memperkuat diplomasi ekonomi mengarah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara dan mempromosikan kemakmuran nasional. Penekanan diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia dengan jelas disebutkan dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk periode 2015-2019. Presiden Jokowi lebih menekankan pada pentingnya meningkatkan kinerja diplomasi komersial dan perdagangan Indonesia, khususnya dalam mempromosikan ekspor (terutama ekspor non-minyak) dan termasuk memperkuat misi perdagangan Indonesia yang akan keluar. Artinya program itu dirancang dalam kebijakan strategis yang kemudian dikomunikasikan baik di level bilateral, regional dan global.

Dalam Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimuat bahwa posisi Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 memotivasi Indonesia agar berperan aktif dalam upaya penanganan krisis ekonomi global dan mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia. Oleh karena itu diplomasi Indonesia di G20 perlu memperkuat kepentingan ekonomi nasional untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi Indonesia yang berkualitas atau (*growth with equity*). Diplomasi Indonesia untuk mendukung quality growth atau growth with equity tersebut sejalan dengan kepentingan negara berkembang.

Langkah strategis diplomasi ekonomi Indonesia yang ketiga adalah penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Pada upaya ini Indonesia meningkatkan kerja sama komprehensif seperti *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, *Preferential Trade Agreement (PTA)*. Mitra kerja sama tersebut adalah peluang Indonesia dalam menjalin dan membuka peluang investasi untuk mendapatkan pemasukan negara yang besar. Kemitraan ini merupakan bagian penting untuk terus mengasah progresivitas diplomasi Indonesia pada saat negara lain pertumbuhan ekonominya stagnan. Misalnya di forum G20 masih sangat menarik bagi Indonesia.

Presiden Jokowi senantiasa menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital di berbagai fora internasional seperti G20. Salah satu contoh isu prioritas yang sering digaungkan oleh pemerintah Indonesia adalah roadmap kebijakan e-commerce, khususnya bagi UMKM, untuk mendukung pengembangan e-commerce. Jadi, roadmap pembangunan ekonomi yang inklusif bagi Indonesia adalah dengan menggunakan platform digital. Pemahaman ekonomi inklusif bagi Jokowi adalah bukti komitmen untuk mendesain ekonomi yang komprehensif di era digital. Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, regional dan global melalui kerja sama G20. Itu artinya setelah Indonesia mampu mendesain kebijakan strategisnya Indonesia mengomunikasikan komitmen tersebut dengan upaya memfasilitasi pebisnis global untuk berdagang, berinvestasi dan

menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai mahluk rasional negara tentunya tidak bisa hidup sendiri apalagi dengan posisi sebagai negara demokrasi. Adapun keterbatasan tersebut adalah menyangkut tiga poin. Poin pertama, kemampuan sumber daya yang menyangkut sumber daya manusia dan sumber daya produksi. Indonesia barangkali memiliki sumber daya produksi yang banyak namun kelemahannya belum tentu kompetitif, produktif, dan inklusif.

